

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh. Data tersebut kemudian diolah terlebih dahulu agar dapat dianalisis dan digunakan untuk pengujian hipotesis. Objek penelitian yang dipilih peneliti yaitu pada Pemerintah Kota Palembang. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan alat bantu Microsoft Excel dan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows versi 22*.

Variabel dalam penelitian ini adalah Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan sebagai variabel independen serta Akuntabilitas Publik sebagai variabel dependen. Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian sebanyak 112 responden, yang dikirim ke 30 OPD, yang respondennya terdiri dari Kepala OPD, Sekretaris dan 2 staf bagian aset.

Untuk menjelaskan deskripsi mengenai data penelitian ini, ditunjukkan pada tabel 4.1, 4.2, 4.3. deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Berikut ini adalah data yang diperoleh mengenai pengembalian kuesioner dalam penelitian ini:

**Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuisioner**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kuesioner Yang Disebar	Jumlah Kuesioner Yang Kembali
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	3
3	Badan Pengelolaan Pajak Daerah	4	4
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	4
5	Badan Perencanaan Pembangunan	4	4

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kuesioner Yang Disebar	Jumlah Kuesioner Yang Kembali
	Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
6	Dinas Pariwisata	4	3
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4
8	Dinas Kebudayaan	4	3
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	3
10	Dinas Kesehatan	4	4
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	3
12	Dinas Sosial	4	4
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	4	4
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4
15	Dinas Pendidikan	4	4
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4	4
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4	4
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	4
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	4	4
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	4
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	4	4
22	Dinas Perindustrian	4	3
23	Dinas Ketenagakerjaan	4	4
24	Dinas Perdagangan	4	4
25	Dinas Perhubungan	4	4
26	Dinas Perikanan	4	4
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4
28	Dinas Kearsipan dan Kearsipan	4	4
29	Inspektorat Kota Palembang	4	3
30	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	4	3
	Total	120	112

Sumber: Data yang diolah, 2019

Tabel 4.1 dapat dilihat kuesioner yang disebar sebanyak 120 kuesioner sedangkan kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 112 kuesioner. Dengan demikian dapat diketahui tingkat pengembalian kuesioner sebesar 93,3%.

4.1.1.1 Karakteristik Responden

Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 112 responden, yang dikirim ke 30 OPD, yang respondennya terdiri dari Kepala OPD, Sekretaris, dan 2 staf bagian aset. Distribusi kuesioner dalam penelitian ini secara lengkap dan ditampilkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	120
Kuesioner yang kembali	112
Kuesioner yang digunakan	112
Tingkat Pengembalian kuesioner	93,3%

Sumber: Data yang diolah, 2019

Kuesioner yang disebar sebanyak 120 dan yang kembali sebanyak 112 kuesioner tingkat pengembalian kuesioner sebesar 93,3%. Kuesioner yang tidak kembali (8 kuesioner) karena dijadikan arsip pada OPD tersebut, serta ada yang benar-benar tidak dikembalikan dan pada saat pengembalian kuesioner tersebut hilang. Karakteristik responden dari 112 kuesioner yang dapat diolah adalah seperti yang ditampilkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-Laki	53	47,3 %
	2. Perempuan	59	52,7 %
	Total	112	100 %
2	Usia		
	1. < 25 Tahun	10	8,92%
	2. 26 s/d 35 Tahun	38	33,92%
	3. 36 s/d 45 Tahun	36	32,14%
	4. 46 s/d 55 Tahun	22	19,64%
	5. > 55 Tahun	6	5,35%

	Total	112	100%
3	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA/ sederajat	8	7,14 %
	2. Diploma III	14	12,5%
	3. Strata 1	58	51,7%
	4. Strata 2	30	26,78%
	5. Strata 3	2	1,78%
	Total	112	100%
4	Lama Bekerja		
	1. < 5Tahun	71	63,39%
	2. 5 s/d 10 Tahun	33	29,46%
	3. > 10 Tahun	8	7,14%
	Total	112	100%

Sumber: Data yang diolah, 2019

Responden didominasi oleh berjenis kelamin perempuan 52,7%, sedangkan berjenis kelamin laki-laki 47,3%. Usia responden 26-35 tahun dan 36-45 tahun lebih banyak dari responden dengan kategori usia <25 tahun dan >55 tahun yaitu masing-masing sebanyak 38 orang 33,92% dan 36 orang 32,14%, sedangkan kategori usia <25 tahun dan >55 tahun sebanyak 10 orang 8,92% dan 6 orang 5,35%. Dari tingkat pendidikan diketahui responden didominasi oleh S-1 sebanyak 51,7%, S-2 sebanyak 26,78%, Diploma III sebanyak 12,5%, SMA/Sederajat 7,14,5% dan Strata 3/S-3 sebanyak 1,78%. Selanjutnya berdasarkan masa bekerja yaitu masa kerja <5 tahun sebanyak 63,39%, 5 s/d 10 tahun sebanyak 29,46% dan >10 tahun sebanyak 7,14%.

4.1.2 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang telah terkumpul yang mencakup perhitungan dari nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standar deviation* (Priyatno, 2018, p. 41), statistik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembukuan	112	23	29	26,44	1,581
Inventarisasi	112	17	25	22,10	2,044
Pelaporan	112	22	30	26,44	2,143
Akuntabilitas Publik	112	26	46	38,57	4,013
Valid N (listwise)	112				

Sumber: *Output SPSS* versi 22 (2019)

1. Pembukuan (X1)

Pembukuan memiliki nilai rata-rata sebesar 26,44. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 29, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 23, standar deviasi sebesar 1,581. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pembukuan ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

2. Inventarisasi (X2)

Inventarisasi memiliki nilai rata-rata sebesar 22,10. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 25, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 17, standar deviasi sebesar 2,044. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi inventarisasi ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

3. Pelaporan (X3)

Pelaporan memiliki nilai rata-rata sebesar 26,44. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 30, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 22, standar deviasi sebesar 2,143. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pelaporan ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

4. Akuntabilitas Publik (Y)

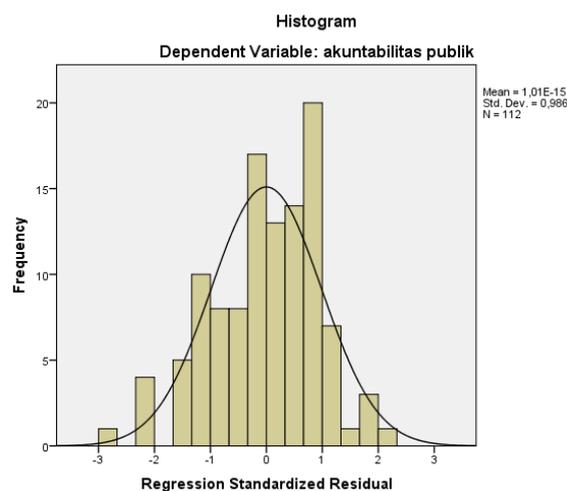
Akuntabilitas publik memiliki nilai rata-rata sebesar 38,57. Untuk nilai tertinggi diperoleh sebesar 45, sedangkan nilai terendah diperoleh sebesar 26,

standar deviasi sebesar 4,013. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akuntabilitas publik ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas Data

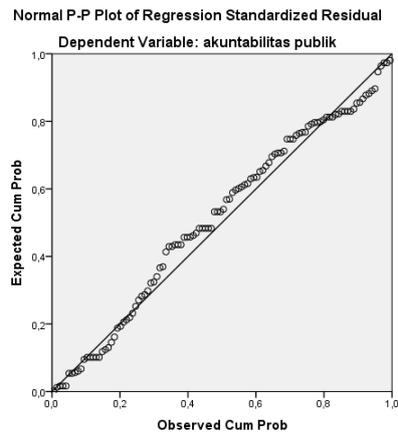
Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal (Priyatno, 2018, p. 73). Model regresi yang baik adalah jika model regresi memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik dilakukan dengan mengamati sebaran plot pada grafik *P-P Plot* dengan ketentuan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Analisis statistik menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk menentukan normalitas distribusi residual jika *Asymp.Sign.(2-tailed) > α (0,05)*, maka data distribusi normal dalam bentuk gambar 4.1.



Sumber: *Output SPSS versi 22 (2019)*

Gambar 4.1

Histogram



Sumber: *Output SPSS versi 22 (2019)*

Gambar 4.2
Diagram Normal P-P Plot of regression standardized residua

Pada gambar 4.1 dapat dilihat titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Demikian juga dengan grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan keberhasilan akuntabilitas publik berdasarkan masukan variabel independennya (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan). Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian dari uji *Kolmogorov-Smirnov* tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,29488082
	Absolute	,089
Most Extreme Differences	Positive	,056
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,943
Asymp. Sig. (2-tailed)		,336

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dalam tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas (p value) atau nilai *asympt.sig.* (2-tailed) residual memiliki nilai 0,336. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,336 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal.

4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Metode uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance dan Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pembukuan	0,579	1,727	Bebas multikolinieritas
Inventarisasi	0,311	3,213	Bebas multikolinieritas
Pelaporan	0,357	2,803	Bebas multikolinieritas

Sumber: *Output SPSS* versi 22 (2019)

Tabel 4.6 menunjukkan nilai *Tolerance* ketiga variabel lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi.

4.1.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada

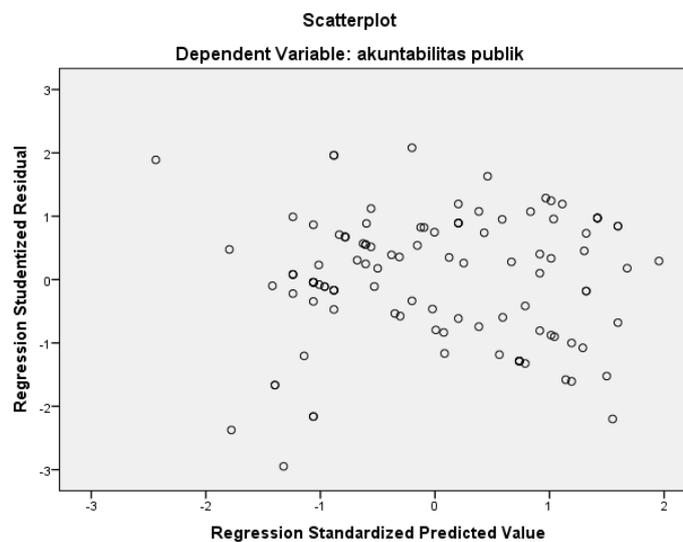
pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pembukuan	0,219	Bebas heteroskedastisitas
Inventarisasi	0,109	Bebas heteroskedastisitas
Pelaporan	0,077	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: *Output SPSS versi 22 (2019)*

Tabel 4.7 dapat diketahui nilai signifikansi (*Sig.*) ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya dapat dilihat gambar 4.3



Sumber: *Output SPSS versi 22 (2019)*

Dapat dilihat gambar di atas tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebarkan). Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.

4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap akuntabilitas publik dilakukan dengan bantuan *software* SPSS. Hasil Regresi Linier dapat dilihat dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linear

Variabel	Koefisien	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	17,115	5,506	3,109	0,002
Pembukuan	-0,410	0,263	-1,556	0,123
Inventarisasi	0,702	0,278	2,526	0,013
Pelaporan	0,635	0,248	2,562	0,012

Sumber: *Output* SPSS versi 22 (2019)

Tabel 4.8 di atas, diperoleh model persamaan regresi linear berganda :

$$Y = 17,115 - 0,410 X_1 + 0,702 X_2 + 0,635 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Publik
- X₁ : Pembukuan
- X₂ : Inventarisasi
- X₃ : Pelaporan
- E : *Error*

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 17,115 menunjukkan apabila variabel independen yaitu pembukuan, nventarisasi dan pelaporan nilainya 0 maka akuntabilitas publik sebesar 17,115 atau 17,115 %.
2. Koefisien regresi pembukuan sebesar -0,410 nilai yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara pembukuan dengan akuntabilitas publik yang artinya jika nilai pembukuan naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik akan turun sebesar 0,410%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
3. Koefisien regresi inventarisasi sebesar 0,702 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara inventarisasi dengan akuntabilitas publik

yang artinya jika nilai variabel inventarisasi naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik akan naik sebesar 0,702%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4. Koefisien regresi pelaporan sebesar 0,635 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pelaporan dengan akuntabilitas Publik yang artinya jika nilai pelaporan naik sebesar 1 maka nilai akuntabilitas publik akan naik sebesar 0,635%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4.1.5 Hasil Uji Hipotesis

4.1.5.1 Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Pengujian secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel independen (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dilakukan untuk menguji diterima atau ditolakny hipotesis yang telah diajukan. Hasil output regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t hitung dan signifikansinya.

Dengan melihat signifikansi tiap variabel, maka dapat dilakukan dengan melihat dari nilai t-hitung dan t-tabel setiap variabel X. Jika nilai t-hitung $>$ t-tabel maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan jika nilai t-hitung $<$ t-tabel maka variabel X secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai t-tabel dicari pada signifikansi 0,05/2 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $112-3-1 = 108$. Hasil diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,982. Penerimaan hipotesis juga dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi $<$ 0,05 atau 5% maka hipotesis dapat diterima. Hasil signifikansi Nilai t (Uji t) dalam penelitian ini terlihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Signifikansi Nilai t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
Pembukuan	-1,556	1,982	0,123	Tidak Signifikan
Inventarisasi	2,526	1,982	0,013	Signifikan
Pelaporan	2,562	1,982	0,012	Signifikan

Sumber: *Output SPSS* versi 22 (2019)

1. Pembukuan (X1)

Variabel pembukuan dari *output* SPSS didapat t hitung sebesar -1,556. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi $0.05/2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $112-3-1 = 108$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,982/-1,982. Karena nilai -t tabel < t hitung ($-1,982 < -1,556$) maka H1 ditolak.

Jika signifikansi < 0.05 maka H2 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H1 ditolak. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ($0,123 > 0,05$) maka H1 ditolak. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar -1,556 dengan nilai signifikansi 0,123, maka dapat disimpulkan pembukuan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik.

2. Inventarisasi (X2)

Variabel Inventarisasi dari *output* SPSS didapat t hitung sebesar 2,526. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi $0.05/2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $112-3-1 = 108$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,982/-1,982. Karena nilai t hitung > t tabel ($2,526 > 1,982$) maka H2 diterima.

Jika signifikansi < 0,05 maka H2 diterima, dan jika signifikansi > 0,05 maka H2 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) maka H2 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,526 dengan nilai signifikansi 0,013, maka dapat disimpulkan inventarisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

3. Pelaporan (X3)

Variabel pelaporan dari *output* SPSS didapat t hitung sebesar 2,562. Untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi $0.05/2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $112-3-1 = 108$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,982/-1,982. Karena nilai t hitung > t tabel ($2,562 > 1,982$) maka H3 diterima.

Jika signifikansi < 0,05 maka H3 diterima, dan jika signifikansi > 0,05 maka H3 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,012 < 0,05$) maka H3 diterima. Jadi dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,562 dengan nilai

signifikansi 0,012, maka dapat disimpulkan pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

4.1.5.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen. Dalam pengujian simultan variabel independen yaitu: Pembukuan (X1), Inventarisasi (X2) dan Pelaporan (X3) ditetapkan ketentuan bahwa jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen (X1,X2,X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Akuntabilitas Publik (Y). Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (k-1) atau 4-1=3, dan df 2 (n-k) atau 112-4=108 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen dan dependen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,689. Hasil dari pengujian simultan (uji F) pada keseluruhan variabel-variabel independen dalam penelitian ini terlihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji Simultan (Uji F)

F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.	Keterangan
17,398	2,689	0,000	Signifikan

Sumber: *Output SPSS* versi 22 (2019)

Tabel 4.10 nilai F_{hitung} adalah sebesar 17,398 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan F_{hitung} sebesar 17,398 lebih besar dari F_{tabel} 2,689, sehingga dapat dinyatakan secara simultan variabel independen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

4.1.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada output *Model Summary* dari hasil analisis regresi berganda. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adj R Square	Std. Error of the Estimate
0,571	0,326	0,307	3,340

Sumber: *Output SPSS* versi 22 (2019)

Hasil uji determinasi diketahui nilai *R Square* sebesar 0,326. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan adalah sebesar 32,6%. Sedangkan sisanya sebesar 67,4% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,307. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan adalah sebesar 30,7% artinya memiliki hubungan relatif rendah. Sedangkan sisanya sebesar 69,3% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pembukuan terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang.

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan pembukuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik. Dikatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan karena pembukuan memiliki nilai *-t-tabel* sebesar -1,982 lebih kecil dari nilai *t-hitung* -1,556 dengan nilai probabilitas 0,123 berarti lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak maka dapat disimpulkan pembukuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Palembang.

Pembukuan (Republik Indonesia, 2016) adalah proses pencatatan BMD kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar BMD. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan

pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Sementara itu Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Dalam praktiknya, Pemkot Palembang sudah melaksanakan pembukuan BMD yang merupakan proses pencatatan BMD ke dalam daftar barang pengguna yang dimuat dalam kartu inventarisasi barang dan kartu inventarisasi ruang, selanjutnya dicatat dalam daftar BMD. Sebelum melakukan pencatatan barang, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Akan tetapi peraturan daerah yang tersedia saat ini tidak mengatur mengenai pencatatan secara spesifik, sehingga membuat pencatatan menjadi kurang terstruktur, akibatnya aset tetap dicatat secara gabungan. Semua aset yang berasal dari sumber yang berbeda-beda pencatatannya dijadikan satu dan tidak dibedakan sehingga menyebabkan kerancuan dalam perlakuan terhadap aset itu sendiri dan sebagian besar pegawai subbidang aset tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari jawaban responden dalam pengisian kuesioner.

Hasil penelitian ini konsisten dengan (Imbiri, 2018) yang menyatakan pembukuan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Pembukuan (Simamora, 2011) tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan aset daerah, hal ini disebabkan karena pengguna barang dan pengurus barang di OPD tidak melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMD, Laporan BMD dan Laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.

4.2.2. Pengaruh Inventarsasi terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan invetarisasi nilai t -hitung sebesar 2,526 lebih besar dari nilai t -tabel 1,982 dengan nilai probabilitas 0,013 berarti lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya inventarisasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Palembang.

Inventarisasi (Republik Indonesia, 2016) merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan BMD dalam unit pemakaian. Pengguna barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal BMD berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventarisasi yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan inventarisasi sudah dilaksanakan oleh kota Palembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dari adanya pelaksanaan inventarisasi, seperti dokumen pencatatan yang berbentuk Buku Induk Inventarisasi, Buku Inventarisasi, KIB dan KIR. Walaupun dalam praktiknya masih kurang baik karena masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya dampaknya banyak aset yang tidak digunakan dan dikelola dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Abas, 2013) yang menyatakan inventarisasi mempengaruhi pengamanan barang milik daerah dan inventarisasi (Imbiri, 2018) mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip *good governance*, baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa BMN BMD.

4.2.3. Pengaruh Pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang.

Pada variabel pelaporan nilai *t*-hitung sebesar 2,562 lebih besar dari nilai *t*-tabel 1,992 dengan nilai probabilitas 0,012 berarti lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_3 diterima maka dapat disimpulkan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah kota Palembang

Pelaporan (Republik Indonesia, 2016) adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Kuasa pengguna anggaran harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan, laporan yang dimaksud digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

Pelaporan yang dilakukan setiap OPD sudah baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun masih belum tepat waktu dikarenakan adanya kendala dalam proses sebelumnya yaitu pembukuan dan inventarisasi. Namun Pemerintah Kota Palembang telah mencoba memaksimalkan kinerjanya dalam upaya pelaksanaan pengelolaan barang, hal ini dilihat dari hasil pelaporan yang telah memuat seluruh dokumen wajib seperti buku inventarisasi, rekap buku inventarisasi, daftar mutasi barang dan sebagainya yang menjadi dasar dalam penyusunan neraca pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh (Simamora, 2011) yang menyatakan pelaporan BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan BMD. Namun, tidak sejalan dengan (Imbiri, 2018) yang menyatakan pelaporan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

4.2.4. Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang.

Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Dikatakan

berpengaruh positif karena nilai F_{hitung} lebih besar F_{tabel} ($17,398 > 2,689$) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

Penatausahaan (Republik Indonesia, 2016) adalah Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam sistem tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dengan penatausahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, serta pemeliharaan terhadap aset tetap/BMD yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus dan dari beberapa siklus tersebut, penatausahaan merupakan hal yang tidak dapat diremehkan, sebab penatausahaan sangat bermanfaat bagi siklus lainnya. Apabila penatausahaan aset tetap dilaksanakan dengan baik, maka pengambilan keputusan terkait masing-masing siklus pengelolaan aset tetap yang lain akan tercipta secara optimal. Oleh karena itu, Kota Palembang harus menjaga dan mempertahankan konsistensi dalam upaya pelaksanaan pengelolaan aset tetap dan agar terwujudnya akuntabilitas publik yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung (Febrianti, 2016) dan (Simamora, 2011) yang menyatakan bahwa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah secara bersama-sama atau serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengamanan BMD. Namun, berbeda dengan penelitian (Abas, 2013) menjelaskan bahwa pengaruh variabel X masih relatif rendah yaitu sebesar 24,1%.